

PENDEKATAN BERBASIS KOMUNITAS DALAM MANAJEMEN PROGRAM SOSIAL: TINJAUAN LITERATUR TERHADAP PRAKTIK PARTISIPATIF, KOLABORATIF, DAN PEMBERDAYAAN

**Adis Prita Aulia¹, Dyana
Chusnulitta Jatnika², Wandu
Adiansah³.**

¹²³Program Studi Kesejahteraan
Sosial, FISIP Universitas
Padjadjaran

Article history

Received : 25 Mei 2025

Revised : 30 Mei 2025

Accepted : 15 Juli 2026

*Corresponding author

Email : adis23001@mail.unpad.ac.id

No. doi: [10.24198/focus.v9i1.63611](https://doi.org/10.24198/focus.v9i1.63611)

ABSTRAK

Pendekatan berbasis komunitas semakin mendapatkan pengakuan sebagai respons strategis terhadap kompleksitas, multidimensionalitas, dan spesifikitas konteks permasalahan sosial di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi, kolaborasi, dan pemberdayaan dalam seluruh siklus manajemen program sosial. Artikel ini menyajikan tinjauan literatur sistematis terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan pada rentang waktu 2015 hingga 2024 untuk mengkaji praktik, tantangan, dan peluang dalam penerapan pendekatan berbasis komunitas dalam konteks program sosial di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan masyarakat, namun masih dominan bersifat simbolik, terutama terbatas pada tahap implementasi. Pendekatan kolaboratif berkontribusi terhadap sinergi antar pemangku kepentingan dan pemanfaatan sumber daya bersama, tetapi efektivitasnya bergantung pada kapasitas institusional dan keberlanjutan komitmen aktor lokal. Sementara itu, pendekatan pemberdayaan berpotensi mendorong kemandirian dan agensi masyarakat, namun masih dihadapkan pada kendala struktural seperti kesenjangan akses terhadap sumber daya, keterbatasan kapasitas, dan lemahnya respons kebijakan. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan pendekatan berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh strategi yang adaptif, sensitif terhadap konteks lokal, dan berorientasi jangka panjang. Diperlukan integrasi antara pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan pemberdayaan secara simultan untuk mendorong pengembangan sosial yang transformatif dan inklusif.

Kata kunci: pendekatan partisipatif, pendekatan kolaboratif, pemberdayaan masyarakat, manajemen program sosial

ABSTRACT

Community-based approaches have gained increasing recognition as strategic responses to the complexity,

multidimensionality, and contextual specificity of social problems in Indonesia. These approaches emphasize participation, collaboration, and empowerment throughout the entire social program management cycle. This article presents a systematic literature review of scholarly articles published between 2015 and 2024 to examine the practices, challenges, and opportunities associated with the implementation of community-based approaches in Indonesian social programs. The findings indicate that participatory approaches encourage community involvement but tend to remain symbolic, primarily limited to the implementation phase. Collaborative approaches foster synergy among stakeholders and shared resource utilization, yet their effectiveness largely depends on institutional capacity and sustained local actor commitment. Meanwhile, empowerment approaches show potential in promoting community agency and self-reliance, but they continue to face structural constraints such as unequal access to resources, limited capacities, and weak policy responsiveness. This review underscores that the success of community-based approaches is highly influenced by adaptive strategies that are context-sensitive and long-term oriented. The integration of participatory, collaborative, and empowerment approaches is essential to advance transformative and inclusive social development.

Key word: *participatory approach, collaborative approach, community empowerment, social program management*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia sebagai negara berkembang terus menghadapi tantangan sosial yang kompleks, dinamis, dan multidimensional. Persoalan yang berkaitan dengan elemen-elemen pendukung kesejahteraan sosial masih menjadi isu dominan dalam agenda pembangunan nasional, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, kekerasan berbasis gender, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta kerentanan kelompok marjinal. Menurut data Badan Pusat Statistik (2025),

jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 24,06 juta jiwa. Meskipun tingkat kemiskinan tidak merepresentasikan keseluruhan persoalan sosial di Indonesia, namun isu ini tetap krusial karena bersifat multidimensional dan berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan yang menghambat keberfungsian sosial individu maupun kelompok. Selain itu, kesenjangan antar wilayah serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dasar memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan dan intervensi sosial yang ada belum sepenuhnya menjangkau

kebutuhan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Di tengah kondisi ini, berbagai program sosial bermunculan sebagai respons dari pemerintah, sektor swasta, maupun kelompok masyarakat sipil, yang berupaya menangani persoalan sosial secara terstruktur dari tingkat komunitas hingga nasional. Namun demikian, efektivitas manajemen program sosial masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi dari kelompok sasaran program. Kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program menjadi hambatan signifikan dalam mencapai tujuan program sosial secara optimal.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program sosial kerap kali disebabkan oleh model manajemen program yang masih didominasi pendekatan *top-down*, yang cenderung birokratis dan kurang responsif terhadap konteks sosial serta budaya lokal. Dalam pendekatan ini, perencanaan program umumnya disusun oleh otoritas pada tingkat tertinggi, kemudian diteruskan secara hierarkis ke level pelaksana yang lebih rendah. Pola ini merefleksikan struktur manajemen yang vertikal dan sentralistik, dengan distribusi kekuasaan (*power*) lebih terpusat pada kelompok elit pengambil keputusan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pendekatan *top-down* sering kali tidak mampu menyelaraskan antara perencanaan program dan kebutuhan nyata di tingkat lokal (Pambudi, 2022), memiliki keterbatasan dalam menjamin keberlanjutan program secara mandiri (Handoko, Marwah, & Widyastuti, 2017), serta berisiko memperkuat dominasi hierarki elit yang pada akhirnya membatasi

partisipasi masyarakat dalam ranah pengambilan kebijakan (Roitman, 2016). Kondisi ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma menuju model manajemen program sosial yang lebih partisipatif, kontekstual, dan inklusif, agar efektivitas dan keberlanjutan program dapat tercapai secara lebih optimal.

Dalam hal ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu alternatif model dalam manajemen program sosial yang efektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat, kolaborasi antar-*stakeholder*, serta memperkuat pemberdayaan terhadap komunitas lokal. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam suatu program melalui proses desentralisasi strategi manajemen program dari bawah (*bottom-up*) guna mencapai kehidupan lebih baik di masa mendatang (Tilaar, 2009; Arnstein, 1969). Pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, sampai tahap evaluasi (Susila, Laksmi, & Udaksana, 2023). Di sisi lain, pendekatan kolaboratif mendorong sinergi dari berbagai *stakeholder* seperti pelibatan pemerintah, perusahaan, akademisi, LSM, masyarakat, dan media (Nainggolan, Pengembangan Desa Wisata Kertarahayu Mitra Binaan CSR PT. Cikarang Listrindo Tbk di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, 2024). Kolaborasi menjadi penting karena merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan sebuah program, dengan komitmen yang terjalin dari beberapa pihak, maka akses terhadap sumber daya dan proses implementasi program akan semakin mudah (Nurhadi et al., 2024; Ibrahim, 2022). Selain itu, praktik pemberdayaan berorientasi pada

peningkatan kapasitas, keterampilan, serta penguatan potensi individu dan kelompok agar dapat memiliki kendali penuh atas keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya (Sukoco et al, 2025; Hapiatun & Malthuf, 2024; Astawa et al., 2022; Bakarbesy, 2025; Nurismail, 2024; Mulyanti et al., 2022).

Beberapa literatur menunjukkan bahwa implementasi dari pendekatan berbasis komunitas yang baik akan mampu meningkatkan tingkat keberhasilan program sosial, serta cenderung memiliki nilai-nilai keberlanjutan yang dirasakan oleh kelompok sasaran dari program terkait (Aditya & Ardiyantika, 2024; Akhrani et al., 2021; Najamudin & Al Fajar, 2024). Namun di sisi lain, realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa penerapan pendekatan berbasis komunitas, seperti partisipatif, kolaboratif, dan pemberdayaan, tidak selalu berlangsung sesuai dengan harapan atau perencanaan awal. Masih banyak program sosial yang belum berhasil mengoptimalkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh, mengalami hambatan dalam menjalin kolaborasi yang efektif antar aktor, serta menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pemberdayaan secara konsisten. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat keberlanjutan program sosial yang dijalankan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa tantangan dan hambatan merupakan aspek yang tidak terhindarkan dalam proses pelaksanaan program sosial, baik dari aspek struktural, kultural, maupun kapasitas sumber daya yang terlibat. Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pendekatan partisipatif,

kolaboratif, dan pemberdayaan diimplementasikan dalam konteks manajemen program sosial di Indonesia menjadi penting, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan program, serta untuk merumuskan strategi intervensi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji literatur yang membahas implementasi pendekatan berbasis komunitas dalam manajemen program sosial, dengan fokus pada tiga prinsip utama: partisipatif, kolaboratif, dan pemberdayaan. Melalui telaah terhadap berbagai sumber akademik yang relevan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman konseptual sekaligus menawarkan wawasan praktis mengenai efektivitas ketiga pendekatan tersebut dalam merespons kebutuhan sosial serta mengatasi permasalahan sosial di Indonesia yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kajian ini juga diharapkan menjadi landasan untuk merumuskan strategi manajemen program sosial yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR). SLR merupakan suatu pendekatan metodologis yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis secara kritis berbagai studi yang relevan dengan topik penelitian melalui prosedur yang terstruktur dan sistematis (Rivera, Ochoa, Larrinaga, & Lasa, 2022). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap perkembangan

teori, temuan empiris, serta kesenjangan penelitian yang ada dalam bidang yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, proses SLR dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) perumusan pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah; (2) penetapan kriteria inklusi dan eksklusi untuk pemilihan literatur yang relevan; (3) pencarian artikel akademik melalui basis data ilmiah seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar pada rentang waktu 2019-2024; (4) seleksi literatur berdasarkan relevansi, kualitas, dan kesesuaian topik; serta (5) analisis tematik terhadap isi artikel yang terpilih untuk mengidentifikasi pola, tantangan, serta kontribusi konseptual dan praktis dari pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan pemberdayaan dalam manajemen program sosial. Hasil dari kajian ini tidak hanya memberikan pemetaan atas pengetahuan yang sudah ada, tetapi juga menyajikan rekomendasi strategis untuk pengembangan program sosial berbasis komunitas di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Partisipatif dalam Manajemen Program Sosial

Dalam *Ladder of Citizen Participation*, Arnstein (1969) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merepresentasikan suatu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh warga untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, menyelesaikan persoalan yang dihadapi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Hobley (1996) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan aktif yang ditinjau dari sejauh mana masyarakat berperan dalam kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan. Sementara itu,

Cohen dan Uphoff (1977) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan individu atau kelompok dalam suatu program, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil, yang berdampak pada penerimaan manfaat secara material maupun nonmaterial. Berdasarkan pandangan tersebut, partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu proses interaktif dan transformatif yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi program, sehingga memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan yang menikmati hasil dari keterlibatannya secara langsung.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program sosial, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Muhamnu et al., 2024; Susila et al., 2023). Pendekatan partisipatif juga telah terbukti dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari kesiapsiagaan bencana, hingga pengelolaan lingkungan serta pembangunan desa. Muhamnu et. al (2024) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam sosialisasi lingkungan berhasil meningkatkan kesadaran terhadap konservasi alam dan pengelolaan sampah. Kesadaran yang dimiliki masyarakat ini tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga memiliki keberlanjutan dalam aksi nyata yang dilakukan masyarakat, yaitu berupa pemanfaatan sampah bekas makanan kemasan menjadi berbagai macam benda. Hal serupa juga ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Susila et

al. (2023) mengenai kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui kegiatan pelatihan dan simulasi evakuasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mitigasi bencana.

Meskipun aktor utama dalam pendekatan partisipatif adalah keterlibatan masyarakat, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif tidak selalu dapat menyentuh *grassroots* atau mencapai kontrol penuh oleh masyarakat dalam hal pengelolaan programnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan yang terjadi hanya sampai pada tahap kemitraan, tanpa adanya kuasa penuh dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat (Sufriadi & Zakaria, 2021; Nomaini et al., 2021). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya oleh Arnstein (1969) bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah program dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan, mulai dari *non-participation* hingga *citizen control*. Dalam konteks program sosial berbasis komunitas, studi menunjukkan bahwa sebagian besar program masih berada dalam tingkat tokenisme, di mana masyarakat hanya dilibatkan dalam tahap konsultatif tetapi tidak memiliki kontrol penuh terhadap keputusan program (Sufriadi & Zakaria, 2021). Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Sufriadi & Zakaria, 2021, studi kasus pada program PAMSIMAS dikemukakan bahwa awalnya mendapatkan partisipasi tinggi dari masyarakat dalam tahap pembangunan, namun pada akhirnya mengalami penurunan keterlibatan masyarakat saat berlanjut ke tahap pemeliharaan. Kondisi ini menunjukkan

bahwa keterlibatan masyarakat dalam fase awal tidak selalu berlanjut hingga fase selanjutnya tanpa adanya mekanisme dan strategi untuk mempertahankan keberlanjutan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa program sosial yang memberi masyarakat kewenangan lebih besar cenderung memiliki dampak yang lebih berkelanjutan (Tesy & Tukiman, 2024; Sukoco et al., 2025).

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk memastikan program sosial berbasis komunitas berjalan secara berkelanjutan. Pertama, pendanaan yang fleksibel dan berkelanjutan merupakan kunci utama agar masyarakat dapat mempertahankan program mereka tanpa ketergantungan sepenuhnya pada bantuan pemerintah. Studi oleh Nomaini et al. (2021) menunjukkan bahwa program yang menyediakan mekanisme *crowdfunding* berbasis komunitas cenderung bertahan lebih lama dibandingkan program yang hanya mengandalkan anggaran dari institusi eksternal. Kedua, pelatihan kapasitas masyarakat berperan penting dalam memperkuat keterampilan dan daya saing komunitas dalam mengelola program sosial (Fitrah et al., 2023; Setiawan & Berlianti, 2025). Pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas memberikan masyarakat keterampilan praktis, baik dalam pengelolaan bisnis sosial, administrasi keuangan, maupun produksi berbasis komunitas, sehingga mereka dapat mempertahankan program tanpa ketergantungan pada pendampingan eksternal.

Meskipun banyak program sosial berbasis komunitas telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, tantangan utama tetap ada,

terutama dalam pendanaan, kebijakan, dan mekanisme kelembagaan (Nurismail et al., 2024; Sufriadi & Zakaria, 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program yang bergantung pada bantuan eksternal memiliki risiko keberlanjutan yang lebih rendah dibandingkan program yang memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya mereka sendiri (Nomaini et al., 2021).

Pendekatan Kolaboratif dalam Manajemen Program Sosial

Dalam studi manajemen sumber daya, teori akses oleh Ribot dan Peluso (2003) menawarkan perspektif kritis terhadap distribusi manfaat, dengan menekankan bahwa akses tidak hanya bergantung pada kepemilikan hukum, tetapi juga pada kemampuan aktual untuk memperoleh manfaat melalui berbagai mekanisme sosial, kelembagaan, ekonomi, dan politik. Akses dipahami sebagai “bundel kekuasaan” yang memungkinkan individu atau kelompok, termasuk yang tidak memiliki hak legal, untuk tetap memanfaatkan sumber daya melalui relasi dan proses yang tersedia dalam sistem. Pendekatan ini relevan dalam konteks manajemen program sosial, di mana kolaborasi lintas aktor dan struktur menjadi kunci untuk memperluas akses dan kebermanfaatan program bagi kelompok sasaran.

Dalam konteks manajemen program sosial, pendekatan kolaboratif memiliki kecenderungan untuk memastikan bahwa manfaat dan akses dapat didistribusikan lebih luas kepada masyarakat, melalui pelibatan berbagai aktor sebagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, komunitas lokal (LSM), sektor

swasta, dan media. Jika merujuk pada teori akses oleh Ribot & Peluso (2003), program sosial yang menggunakan pendekatan kolaboratif tidak hanya bergantung pada regulasi dan kepemilikan formal yang menentukan siapa yang memiliki hak atas sumber daya, tetapi lebih berorientasi kepada bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam sistem dapat mengakses manfaat dari program dan memberikan manfaat untuk program melalui hubungan berupa relasi sosial maupun kelembagaan.

Teori akses memberikan pemahaman bahwa praktik kolaborasi memungkinkan terjadinya redistribusi sumber daya dan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap suatu sumber daya. Misalnya, model Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata mempraktikkan bentuk kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas lokal, dan media. Dalam hal ini, kolaborasi menunjukkan efektivitasnya dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif dalam manajemen program sosial. Desa Wisata yang dikelola dengan menggunakan model Kolaborasi Pentahelix mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka akses bagi kelompok yang sebelumnya tidak terlibat dalam sistem ekonomi wisata lokal (Nainggolan, 2024). Hal ini mencerminkan prinsip teori akses, bahwa keberhasilan distribusi manfaat tidak hanya bergantung pada hak kepemilikan atas destinasi wisata, tetapi juga pada kemampuan aktor-aktor dalam sistem pariwisata untuk memperoleh manfaat melalui relasi sosial, tata kelola modal, kebijakan, dan kelembagaan. Selain itu, peran sektor swasta melalui *corporate social responsibility* (CSR) tidak hanya berkontribusi dalam pendanaan tetapi juga

dalam pendanaan, tetapi juga dalam pendampingan dan fasilitasi program, memastikan bahwa desa wisata berkembang dengan pendekatan yang berkelanjutan.

Kasus serupa ditemukan pada studi Rachmawan et al. (2021), dengan kondisi teori akses yang relevan juga dengan program Perhutanan Sosial. Masyarakat lokal sering kali tidak memiliki kepemilikan formal di atas lahan hutan, tetapi tetap memperoleh manfaat melalui praktik kerja sama dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya. Keberhasilan program Perhutanan Sosial tidak hanya bergantung pada hak legal yang diberikan kepada komunitas lokal, melainkan pada bagaimana masyarakat dapat mengakses manfaat melalui jaringan sosial, edukasi lingkungan, dan proses distribusi ekonomi yang berbasis komunitas. Kolaborasi dalam perhutanan sosial memungkinkan masyarakat dan komunitas lokal mendapatkan keuntungan dari sumber daya hutan tanpa harus memiliki hak legal atas lahan atau tanah. Lebih jauh lagi, studi kasus pada (Ibrahim, 2022) menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM dan akses terhadap jaringan keuangan dan *collaborative governance* telah meningkatkan kapasitas bisnis bagi para pelaku usaha UMKM. Pendekatan kolaboratif yang digunakan memungkinkan UMKM memperoleh akses ke sumber daya keuangan, pelatihan bisnis, dan akses terhadap pasar yang sebelumnya terbatas dan relatif sulit bagi para pelaku UMKM. Studi menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki keterlibatan dalam jaringan kolaboratif lebih memiliki ketahanan yang baik dalam persaingan pasar yang kompetitif, karena tidak hanya mengandalkan kepemilikan aset,

melainkan juga memanfaatkan proses non-kepemilikan untuk mengakses modal.

Pendekatan kolaboratif dalam manajemen program sosial telah banyak digunakan dan menjadi model utama dalam memastikan keberlanjutan, efektivitas, serta inklusivitas program yang melibatkan banyak *stakeholder*. Namun, keberlanjutan dari pendekatan kolaboratif dalam manajemen program sosial tidak hanya bergantung pada regulasi yang birokratis dan struktural serta kepemilikan formal, tetapi tergantung juga pada bagaimana aktor-aktor dalam sistem dapat mengakses dan mempertahankan manfaat dari sebuah program melalui proses yang lebih dinamis dan fleksibel. Beberapa studi yang menyoroti efektivitas pendekatan kolaboratif menunjukkan bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan *stakeholder* lain di awal saja, kemampuan berbagai *stakeholder* mempertahankan akses terhadap sumber daya dan aliran manfaat dalam jangka panjang juga menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan sebuah program sosial yang menggunakan pendekatan kolaboratif (Nurhadi et al., 2024; Napisah et al., 2024). Strategi digitalisasi yang didukung oleh kolaborasi antara akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal, maka menghasilkan dampak berupa efektivitas promosi yang meningkat secara signifikan (Nurafifah et al., 2024).

Pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan perikanan berbasis komunitas telah terbukti menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir untuk mengelola sumber daya laut secara lebih berkelanjutan. Sistem pengelolaan perikanan tidak hanya berfokus pada aspek

ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial karena terdapat keterlibatan berbagai *stakeholder*, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal. Literatur menunjukkan bahwa model kemitraan yang melibatkan banyak pihak dalam sektor perikanan memungkinkan masyarakat pesisir untuk memperoleh manfaat lebih besar dari industri perikanan tanpa harus memiliki kendali legal dan kendali eksklusif atas kawasan perairan (Winata, 2023).

Meskipun beberapa literatur mengemukakan bahwa pendekatan kolaboratif telah berhasil mendorong efektivitas program sosial, keberlanjutannya sangat bergantung pada bagaimana koordinasi dan kerjasama antar aktor yang dilakukan dalam jangka panjang (*maintenance*). Jika program sosial tidak memiliki sistem regulasi yang fleksibel, proses pendanaan yang tidak transparan dan sistematis, program sosial yang menggunakan pendekatan kolaborasi seringkali menghadapi kendala dalam mempertahankan stabilitas kekuasaan antar-*stakeholder*. Dalam beberapa studi kasus, dominasi sektor tertentu (pemerintah, swasta, akademisi, atau masyarakat) dapat menyebabkan adanya sentralisasi dan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berisiko menghambat proses distribusi manfaat kepada individu atau komunitas yang paling membutuhkan (Nurhadi et al., 2024). Oleh karena itu, peneliti mendapati bahwa penting untuk memastikan bahwa setiap aktor dalam pendekatan kolaboratif memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam proses pengelolaan sumber daya.

Selain aspek sentralisasi kekuasaan, peraturan yang terlalu kaku juga menjadi tantangan dalam pendekatan kolaboratif. Beberapa kebijakan seringkali menghambat kreativitas, inovasi, dan inisiatif masyarakat lokal dalam mengembangkan program sosial yang lebih relevan dan cenderung lebih adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Misalnya, dalam studi kasus perhutanan sosial dalam (Rachmawan, Seda, & Siburian, 2021), meskipun teori akses telah memberikan kesempatan bagi komunitas lokal dalam memperoleh manfaat tanpa harus memiliki kepemilikan legal, proses pembangunan legitimasi dan mekanisme kemitraan dengan *stakeholder* eksternal tetap menjadi faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan dari proses pendistribusian manfaat (Rachmawan, Seda, & Siburian, 2021). Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dari program sosial dengan pendekatan kolaboratif, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, koordinasi yang tepat dan optimal, dan mekanisme pendanaan yang memungkinkan masyarakat lokal memiliki kontrol lebih besar terhadap program sosial yang mereka jalankan (Nurhadi et al., 2024; Rachmawan et al., 2021; Ibrahim, 2022).

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Manajemen Program Sosial

Pemberdayaan merupakan konsep yang mengaitkan kekuatan individu, sistem bantuan sosial, dan perilaku proaktif dengan perubahan kebijakan dan transformasi sosial (Perkins & Zimmerman, 1995). Dalam manajemen program sosial berbasis komunitas, pemberdayaan tidak sekadar soal distribusi sumber daya, tetapi juga penguatan kapasitas individu untuk berpikir kritis, mengambil keputusan

strategis, dan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang dinamis. Contohnya, pelaku UMKM tidak hanya diberi akses modal, tetapi juga dibekali pelatihan dan pendampingan agar mampu mengelola tantangan secara mandiri dan berkelanjutan. Sebagian besar studi menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan akses terhadap sumber daya, tetapi juga pada penguatan kapasitas lokal dan pengembangan keterampilan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program sosial (Misalnya: Tesya & Tukiman, 2024; Malthuf & Hapiatun, 2024; (Nurismail, Rohendi, & Kusrini, 2024).

Beberapa program sosial berbasis komunitas yang berorientasi pada pemberdayaan juga mempertimbangkan aspek potensi lokal untuk mendorong kemandirian masyarakat sekitar, seperti halnya studi kasus pada penelitian Tesya & Tukiman (2024) yang melakukan budidaya maggot sebagai upaya strategi pengembangan ekonomi desa (Tesya & Tukiman, 2024). Selain itu, program pemberdayaan eks-ODGJ dalam (Sukoco et al., 2025) juga mencerminkan keberhasilannya dalam memberdayakan warga eks-ODGJ untuk dapat memiliki keterampilan membuat batik ciprat, hal ini mengarah kepada pemberdayaan dalam aspek sosial warga penerima manfaat, yaitu untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang sering dialami oleh warga eks-ODGJ. Lalu, program pemberdayaan ekonomi melalui program PKK yang mendukung kesejahteraan perempuan dan keluarga juga mencerminkan adanya pemberdayaan komunitas pada aspek ekonomi dan sosial (Malthuf & Hapiatun, 2024).

Dari berbagai literatur yang ditemukan, program sosial berbasis pemberdayaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi saja, tetapi juga memastikan dan mendorong agar komunitas memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut secara mandiri. Salah satu model pemberdayaan dalam pengelolaan akses oleh komunitas adalah *Asset-Based Community Development* (ABCD), yang berfokus pada kekuatan dan kapasitas lokal. Model program ini memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki komunitas lokal untuk dapat dimanfaatkan oleh mereka dalam mencapai kesejahteraan. Model ABCD dalam (Astawa et al., 2022) berhasil meningkatkan keterlibatan sosial lansia yang sebelumnya kurang memiliki peran dalam komunitas, melalui pengoptimalan aset sosial, keahlian, dan pengalaman lansia untuk berkontribusi secara aktif dalam kegiatan komunitas. Keberhasilan dari program ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya memberikan akses terhadap sumber daya, melainkan juga membantu menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi aktif dari komunitas lokal dan peningkatan kapasitas individu dalam komunitas.

Literatur tentang pemberdayaan ekonomi keluarga penyandang disabilitas dalam (Bakarbesy, 2025) menyebutkan bahwa model intervensi sosial yang berbasis pemberdayaan ekonomi memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas ekonomi bagi individu dengan disabilitas dan keluarga mereka. Jika ditelaah menggunakan perspektif *strength-based*, individu dengan disabilitas tidak dipandang sebagai kelompok yang

membutuhkan bantuan semata, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang memiliki kekuatan dan potensi untuk berkembang. Model intervensi sosial ini juga sejalan dengan teori pemberdayaan dalam (Perkins & Zimmerman, 1995) yang menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya tentang memberi bantuan, tetapi juga tentang membangun kapasitas individu agar mereka dapat mengelola kehidupan mereka secara mandiri.

Lebih jauh lagi, program pendampingan sosial dalam pengembangan usaha KUBE dalam (Nurismail, Rohendi, & Kusnadi, 2024) juga merupakan contoh bagaimana pendekatan pemberdayaan dapat meningkatkan keterampilan dan stabilitas ekonomi bagi keluarga anggota program sosial. Dalam model pendampingan sosial berbasis pemberdayaan, individu yang terlibat dalam usaha KUBE tidak hanya menerima bantuan finansial, tetapi juga pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan pasar dan membangun keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang berbasis penguatan kapasitas individu dan komunitas lebih efektif dalam menciptakan perubahan yang bertahan lama dibandingkan dengan model intervensi yang hanya memberikan bantuan finansial.

Program sosial yang berorientasi pada pemberdayaan juga memiliki relevansi dengan situasi krisis atau keadaan darurat, misalnya seperti yang terlihat dalam program bantuan sosial di masa pandemi dalam (Mulyanti & Akbar, 2021). Literatur ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemberdayaan dalam distribusi

bantuan sosial selama pandemi tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan ekonomi, melainkan memastikan juga bahwa individu dan komunitas memiliki kapasitas untuk pulih dari dampak krisis. Jika ditinjau menggunakan konteks *strength-based*, selain berorientasi pada pemulihan ekonomi, intervensi masa krisis juga pada peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun ketahanan sosial, sehingga masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Temuan-temuan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam program sosial berbasis komunitas tidak hanya tentang memberikan akses terhadap sumber daya, tetapi juga memastikan bahwa individu dan komunitas memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya tersebut secara mandiri. Teori pemberdayaan oleh Perkins & Zimmerman (1995) menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses multidimensional yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, yang dalam pekerja sosial dapat dikaitkan dengan *strength-based perspective* dalam intervensi sosial. Studi tentang berbagai model pemberdayaan menunjukkan bahwa program berbasis penguatan kapasitas lokal, pendampingan sosial, dan pendekatan berbasis aset lebih efektif dalam menciptakan perubahan yang bertahan lama dibandingkan dengan model intervensi yang hanya berfokus pada bantuan finansial.

Tantangan dan Evaluasi dalam Implementasi Program Sosial Berbasis Komunitas

Meskipun ragam literatur menunjukkan keberhasilan pendekatan berbasis komunitas dalam manajemen program

sosial, beberapa literatur lainnya juga menyebutkan bahwa tentu saja terdapat tantangan dalam proses implementasi program yang sering kali menghambat efektivitas dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Tantangan ini mencakup kesenjangan antara perencanaan dan pengawasan, hambatan birokrasi dalam kerja kolaboratif, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya evaluasi berkelanjutan dalam program sosial (Ula et al., 2024; Nurismail et al., 2024).

Salah Satu hal yang menjadi kendala utama dalam manajemen program sosial berbasis komunitas adalah adanya kesenjangan antara perencanaan dan pengawasan, yang menyebabkan program tidak berjalan sesuai target awal yang telah ditetapkan. Studi menunjukkan bahwa kurangnya mekanisme koordinasi yang baik dalam tahap implementasi seringkali menghambat efektivitas program sosial, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara tujuan awal program dengan pelaksanaan di lapangan (Ula et al., 2024). Selain itu, kesenjangan antara tujuan awal dengan pelaksanaan ini juga berakibat pada minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, yang juga menyebabkan ketidakefisienan dalam proses distribusi anggaran dan tenaga kerja. Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih integratif agar perencanaan program dapat berjalan sejalan dengan mekanisme pelaksanaan yang lebih efektif.

Hambatan birokrasi juga turut hadir menjadi tantangan dalam program sosial berbasis komunitas dalam praktik kolaborasi, dengan regulasi yang terlalu kaku sering kali memperlambat

implementasi kebijakan dan membatasi fleksibilitas *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan program (Nurismail, Rohendi, & Kusnadi, 2024). Sistem administrasi yang terlalu kompleks akan menyebabkan keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan berdampak pada proses distribusi sumber daya yang kurang optimal. Selain itu, birokrasi yang berlebihan juga seringkali menghambat keterlibatan komunitas lokal, karena prosedur yang terlalu panjang dan kompleks menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam tahap pengelolaan program. Oleh karena itu, sistem regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif diperlukan untuk memastikan bahwa program dapat berjalan dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Selain hambatan birokrasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan program sosial menjadi sebuah tantangan paling besar dalam keberlanjutan program berbasis komunitas. Literatur tentang program PAMSIMAS menunjukkan bahwa meskipun masyarakat aktif terlibat dalam tahap perencanaan dan pembangunan infrastruktur, tingkat partisipasinya menurun secara drastis dalam tahap pemeliharaan (Sufriadi & Zakaria, 2021). Kondisi penurunan partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya bergantung pada keterlibatan masyarakat di awal saja, tetapi juga mengenai bagaimana komunitas dan masyarakat dapat secara mandiri tetap berkontribusi dalam pemeliharaan program agar tetap berjalan dan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Dalam upaya meningkatkan keterlibatan komunitas, perlu adanya mekanisme insentif dan edukasi berkelanjutan yang

menanamkan rasa memiliki terhadap program sosial, sehingga masyarakat dapat tetap berperan dalam pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur yang telah dibangun sejak awal.

Sumber daya menjadi faktor yang juga kritis dalam keberlanjutan program sosial berbasis komunitas, terutama dalam inisiatif yang berorientasi pada inklusivitas. Program perpustakaan berbasis inklusivitas menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya seringkali menjadi faktor utama yang menghambat operasional dan pengembangan layanan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan individu dengan disabilitas (Novianti et al., 2023). Keterbatasan dari sumber daya ini tidak hanya mencakup aspek finansial saja, tetapi mencakup kapasitas pengelolaan dan dukungan kelembagaan juga, yang berakibat pada minimnya upaya inovatif dalam mempertahankan keberlanjutan program. Maka, integrasi dengan model pendanaan alternatif (*crowdfunding*, misalnya), kemitraan dengan sektor swasta, serta strategi penggalangan dana berbasis komunitas perlu diterapkan untuk memastikan keberlanjutan program sosial dalam jangka waktu panjang.

Pada program yang memiliki sasaran kelompok rentan seperti anak jalanan, evaluasi dalam studi menunjukkan bahwa kendala utama dalam proses implementasi program adalah kurangnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan sebagai upaya pengukuran dampak jangka panjang (Dharmayanti & Kurniawan, 2022). Intervensi sosial bagi anak jalanan seringkali mengalami kendala dalam keberlanjutan pendidikan, rehabilitasi sosial, serta proses integrasi mereka ke dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan

banyak peserta program yang kembali menghadapi kondisi sosial yang sulit setelah berakhirnya program. Untuk mengatasi tantangan ini, evaluasi berbasis data (*evidence-based*) perlu diperkuat agar program dapat lebih efektif dalam menciptakan solusi jangka panjang dan berkelanjutan, terutama dalam memastikan akses pendidikan dan layanan sosial bagi anak jalanan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik manajemen program sosial berbasis komunitas yang mengadopsi pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan tersebut memiliki peran saling melengkapi dalam mendorong keberlanjutan dan efektivitas program. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat menjadi subjek aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, meskipun dalam banyak kasus partisipasi tersebut masih bersifat simbolik atau konsultatif. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu terlibat secara substantif dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pendekatan kolaboratif menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh adanya kemitraan yang kuat antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan media. Model pentahelix menjadi acuan penting dalam menciptakan ekosistem kolaborasi yang mendukung sinergi lintas sektor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Pendekatan pemberdayaan melengkapi kedua pendekatan sebelumnya dengan

menekankan pentingnya proses transformasi sosial melalui penguatan kapasitas individu dan kolektif. Pemberdayaan bukan hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kesadaran kritis, kemandirian, dan kontrol atas sumber daya yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, integrasi ketiga pendekatan ini yang saling mendukung secara strategis dan operasional dapat menjadi landasan dalam merancang model manajemen program sosial yang kontekstual, berkelanjutan, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., & Ardiyantika, S. (2024). Restorasi dan Konservasi berbasis Komunitas: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Katingan Mentaya Project Kalimantan. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial*, vol. 23(1).
- Akhrani, L. A., Herani, I., & Hany, A. (2021). Empowerment Community: Pembentukan Komunitas Peduli Lingkungan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Bencana & Kesehatan pada Warga Bantar Kali di Kampung Payung Kertas, Malang. *Akhrani, Herani, Hani Journal of Dedicators Community*, Vol 5(No 2), 159-181. DOI: 10.34001/jdc.v5i2.1419
- Arnstein, S. R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation". *Journal of the American Planning Association*.
- Astawa, I. M., Pugra, I., & Suardani, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Lanjut Usia dengan Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) di Dusun Kawan Desa Bakas Kabupaten Klungkung. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, Vol. 8 No.2.
- Azizah, L. A., Tunda, A., Kusuma, N., & Fahrur, G. S. (2025). Mekanisme Pelaksanaan Model Long-term Care (LTC) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar di Kota Kendari. *Jurnal Neo Societal*, Vol. 10 No.1.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *PROFIL SUKU DAN KERAGAMAN BAHASA DAERAH HASIL LONG FORM SENSUS PENDUDUK 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025, January 15). Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen.
- Bakarbessy, D. (2025). Model Intervensi Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Penyandang Disabilitas: Pendekatan Participatory Action Research. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol.8 No.2.
- Cohen, J. and Uphoff, N. (1977) *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Cornell University, Ithaka.
- Dharmayanti, N. R., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi

- pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur). *Journal Republika*, Vol.10 No.1.
- Fitrah, M., Suranto, Wening, S., & Jayanti, M. I. (2023). Program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan Pendekatan Evaluasi Goal free terhadap Integrasi Sosial, Kesejahteraan Emosional, dan Kepuasan Siswa. *el-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar*, Vol 7 No 2.
- Handoko, W., Marwah, S., & Widyastuti, T. R. (2017). MENJAGA SUSTAINABILITAS PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR KEBUMEN: ANTARA CORAK TOP-DOWN, PARTISIPATIF DAN INISIASI KELEMBAGAAN LOKAL. *Sosiohumaniora*, 19(3): 244-252.
- Hobley, M. (1996). Participatory forestry: The process of change in India and Nepal. Londo: Rural Development Forestry Network, Overseas Development Institute.
- Ibrahim, H. R. (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pendekatan Inovasi Sosial dan Collaborative Governance. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vo. 43 No. 1.
- Malthuf, M., & Hapiatun, M. (2024). Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). *Society: Jurnal Jurusan Tadris IPS*.
- Muhamnu, A. H., Septiani, D. T., Putri, F. D., Indriana, H., & Shohibuddin, M. (2024). Pendekatan Partisipatif dalam Program Sosialisasi Lingkungan (Bank Sampah, Zero Waste, Eco Enzyme, Ecobrick). *E-DIMAS Education-Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Mulyanti, R., & Akbar, R. M. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kebutuhan Hidup Pada Masa Pandemi Melalui Program Bantuan Sosial di Kelurahan Cibaduyut Kidul. *Proceedings: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol.1 No.70.
- Nainggolan, A. (2024). Pengembangan Desa Wisata Kertarahayu Mitra Binaan CSR PT. Cikarang Listrindo Tbk di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. *Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol.6 No. 1.
- Najamudin, F., & Al Fajar, A. H. (2024, December 2). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PENDEKATAN ABCD UNTUK MENCAPAI SDG 1: TANPA KEMISKINAN. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 7(No. 2), 142 - 158. doi: 10.24198/focus.v7i2.58936
- Napisah, L. S., Taufikurachman, C., & Harto, B. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan Manajemen Keuangan Partisipatif pada UMKM Sektor Kuliner dan Fashion di Bandung. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5 No. 4 .

- Nomaini, F., Saraswati, E., & Effendi, S. (2021). Sosialisasi Manajemen Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lorok Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Abdimas PHB: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 2.
- Novianti, D. A., Kumala, A. A., Wulandari, W. E., & Puspitadewi, G. C. (2023). Evaluasi Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Umum Kota Batu Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick. *LIBTECH: Library and Information Science Journal*, Vol.4 No.1.
- Nurafifah, Ariyanti, O., & Sujud, F. A. (2024). Strategi Pemasaran Digital UMKM dengan Pendekatan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Legoksayem. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Al Ghobi*, Vol. 1 No. 1.
- Nurhadi, A., Sujalmi, Y. B., & Said, L. R. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Program Inovasi Sosial PT Adaro Indonesia dalam Upaya Penguatan Implementasi CSR. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hummaniora*, 8(4): 1876-1889.
- Nurismail, N. A., Rohendi, A., & Kusnadi, D. (2024). Strategi Manajemen Pendamping Sosial dalam Pengembangan Usaha Kelompok Binaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut. *Journal of Social and Economics Research*, Vol.6 No.1.
- Pambudi, A. S. (2022). Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Top-Down dan Bottom-Up Tentang Pembangunan Air Minum: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1):22-43.
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. (1995). Empowerment Theory, Research, and Application. *American Journal of Community Psychology*.
- Rachmawan, D., Seda, F. S., & Siburian, R. (2021). MELENGKAPI ANALISA TEORI AKSES DENGAN PENDEKATAN KOLABORATIF PADA KONTEKS PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: STUDI KASUS LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) RAWA SAKTI, PEMALANG. *Jurnal Kawistara*, Vol. 11 No.2: 156-173.
- Ribot, J., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*.
- Rivera, A. C., Ochoa, W., Larrinaga, F., & Lasa, G. (2022). How-to Conduct a Systematic Literature Review. *Elsevier*.
- Roitman, S. (2016). Top-Down and Bottom-Up Strategies for Housing and Poverty Alleviation in Indonesia: The PNPM Programme in Yogyakarta. DOI: 10.1007/978-3-319-29948-8_11.
- Setiawan, F., & Berlianti. (2025). Pelaksanaan Pelayanan Sosial melalui Progam Pendidikan Berbasis Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Yayasan Rumah Ceria, Medan, Sumatera Utara. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol. 5 no.1.
- Sufriadi, D., & Zakaria. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Aceh Jaya. *JPNi: Jurnal Pengabdian Nasional Indonesia*, Vol 2 No 2.

Sukoco, N. R., Aini, N., Prahastut, E., & Nafiah, A. (2025). Studi Tentang Pengelolaan Program Sosial Pemberdayaan Warga Eks-ODGJ dengan Membuat Batik Ciprat. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 9 No.1.

Susila, I. D., Laksmi, I. A., & Udaksana, M. W. (2023). Upaya Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pelatihan Berbasis Pendekatan Partisipatif Masyarakat di Banjar Krisnantara Desa Tibubeneng. *SAVE: Synergy and Society Service*, Vol. 3 No.2: 46-52.

Tesya, D. M., & Tukiman. (2024). Implementasi Program Desa Berdaya Melalui Budidaya Maggot di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol.8 No.1.

Ula, H., Suwarno, Suradji, M., & Mukhlas. (2024). Manajemen Program Pendidikan Karakter dalam Meningkatkan Sikap Sosial Siswa di Era Disrupsi Informasi. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol.7 No.2.

Winata, I. P. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Pengembangan Usaha Perikanan. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, Vol. 1.